



PERAN DANA GAMPONG DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH UTARA

Setia Budi¹, M.Authar, ND², Eva wardah³, Muhammad Habibi⁴, Nurbaiti Sinaga⁵

Corresponding author: Setiabudi@animal.ac.id

ABSTRACT

Village funds are funds sourced from the state budget (APBN) which are prioritized for the implementation of development and community development based on the potential in the village. prioritized for the implementation of development and community development based on the potential that exists in the village. Muara Batu Sub-district is one of the recipients of the village fund or the largest ceiling, has a large agricultural area, the majority of the farming community work as farmers but the initial survey of village funds for agriculture was only a small part realized in North Aceh District. Gampong Cot Trueng, Meunasah Baro, Teupin Banja are the highest, medium and lowest ceiling recipients selected as research areas. This study aims to determine the contribution of gampong funds in agricultural development in Muara Batu sub-district and to identify the role of gampong funds in agricultural development in Muara Batu sub-district. The analysis method used is descriptive qualitative. The results showed that the role of gampong funds in agricultural development in 2018 contributed 42%, in 2019 contributed 11%, in 2020 contributed 44%, and the identification of the role of gampong funds in agricultural development in 2020 contributed 44%. 2020 contributed 44%. and identification of the role of village funds in agricultural development, namely procurement of seeds, procurement of fertilizers, procurement of agricultural capital, training of horticultural crops, construction of irrigation channels, construction of tertiary channels, construction of farm roads, construction of agricultural centers. The contribution and identification of the role of village funds in agricultural development was able to increase rice production from 7.2 tons/ha to 8.5 tons/ha.

Keywords: role, gampong fund, contribution, agricultural development, farmer community

ABSTRAK

Dana *gampong* adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat berdasarkan potensi yang ada di *gampong*. Kecamatan Muara Batu merupakan salah satu penerima dana *gampong* atau pagu terbesar, memiliki area pertanian yang cukup luas, mayoritas masyarakat petani bekerja sebagai petani namun survei awal dana *gampong* untuk pertanian hanya sebagian kecil terealisasi di Kabupaten Aceh Utara. *Gampong* Cot Trueng, Meunasah Baro, Teupin Banja adalah penerima pagu tertinggi, sedang dan terendah yang terpilih menjadi daerah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dana *gampong* dalam pembangunan pertanian di kecamatan Muara Batu dan untuk mengidentifikasi peran dana *gampong* dalam pembangunan pertanian di Kecamatan

^{1,2,3,4,5} Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas

Muara Batu. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan peran dana *gampong* dalam pembangunan pertanian tahun 2018 berkontribusi sebesar 42%, tahun 2019 berkontribusi 11% tahun 2020 berkontribusi sebesar 44%. dan identifikasi peran dana *gampong* dalam pembangunan pertanian yaitu pengadaan bibit, pengadaan pupuk, pengadaan modal pertanian, pelatihan tanaman hortikultura, pembuatan saluran irigasi, pembangunan saluran tersier, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan balai pertanian. Kontribusi dan identifikasi peran dana *gampong* dalam pembangunan pertanian mampu meningkatkan produksi padi 7,2 ton/ha menjadi 8,5 ton/ha.

Keywords: peran, dana gampong, kontribusi, pembangunan pertanian, masyarakat petani

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan sebuah proses yang menghasilkan perubahan sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial dan sebagainya demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan pertanian diarahkan menuju pembangunan pertanian yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*), sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan pertanian (termasuk pembangunan *gampong*) yang berkelanjutan merupakan isu penting strategis yang menjadi perhatian dan pembicaraan di semua negara dewasa ini (Munawaroh, 2019)

Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kala, desa dijadikan sebagai fokus utama dalam pembangunan dalam rangka mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah serta antara desa dan kota. Hal ini ditunjukkan dari sembilan agenda prioritas yang disebut Nawa Cita. Pada poin ketiga Nawa Cita disebutkan bahwa, pemerintah bertekad membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia (Visi Misi Jokowi JK, 2015-2019).

Gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Perbup, 2019).

Dana *gampong* adalah dana yang bersumber dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang ditransfer melalui APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan untuk desa.

Penggunaan dana *gampong* sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam (RPJMN) rancangan pembangunan jangka menengah 2015-2019, maka penggunaan dana *gampong* perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan *gampong* tertinggal demi terwujudnya kemandirian *gampong*. Penggunaan dana *gampong* pada dasarnya merupakan hak pemerintah *gampong* sesuai dengan kewenangan

dan prioritas kebutuhan masyarakat *gampong* setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Prioritas pemerintah dalam RPJMN adalah MIPE (Maritim, Infrastruktur, Pertanian dan Energi). Pengembangan sektor BUMG (Badan Usaha Milik *Gampong*) sebaiknya sejalan dengan prioritas tersebut. Kebijakan ekonomi tentu akan fokus pada sektor prioritas. Baik kebijakan fiskal maupun sektor. Bila BUMG bergerak pada sektor tersebut, maka akan ada lingkungan bisnis yang menguntungkan. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Tahun 2016 Kecamatan Muara Batu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Utara yang menerima anggaran dana *gampong* dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang cukup besar, dan memiliki jumlah *gampong* yang cukup banyak yang berjumlah 24 (Dua Puluh Empat) *gampong*. Kecamatan Muara Batu juga merupakan salah satu daerah yang memiliki luas wilayah yang kecil dan area pertanian yang cukup luas sebesar 2.326,4 ha. Adapun jumlah pagu dan jumlah *gampong* dan tabel luas wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Penerima Pagu Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020

No	Nama Kecamatan	Jumlah <i>Gampong</i>	Jumlah Pagu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Matangkuli	49	34,218,943,000
2	Sawang	39	23,336,853,000
3	Syam Bayu	38	26,647,897,000
4	Tanah Luas	57	39,899,535,000
5	Seunuddon	33	23,601,776,000
6	Baktiya	56	40,620,942,000
7	Syamtalia Aron	34	23,756,654,000
8	Kuta Makmur	39	28,022,312,000
9	Paya Bakong	39	27,507,353,000
10	Meurah Mulia	50	35,144,428,000
11	Tanah Jambo Aye	47	34,267,935,000
12	Lhouksukun	75	54,435,978,000
13	Samudera	41	28,259,237,000
14	Pirak timu	23	16,083,026,000
15	Dewantara	15	12,188,306,100
16	Lapang	11	7,861,201,000
17	Langkahan	23	16,811,727,000

18	Nibong	20	14,094,859,200
19	Muara Batu	24	17,390,460,000
20	Nisam	29	20,989,511,000
21	Cot Girek	24	17,249,230,000
22	Baktiya Barat	26	17,930,097,000
23	Tanah Pasir	18	12,515,674,000
24	Simpang Keuramat	15	9,721,048,000
25	Gerpas	11	7,807,026,000
26	Banda Baro	9	6,651,840,000
27	Nisa Antara	6	4,803,737,082
Total Pagu			601,817,585,382

Sumber : DPMPPKB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), 2020.

Berdasarkan luas area pertanian yang cukup luas di Kecamatan Muara Batu sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi JK, *gampong* dijadikan sebagai fokus utama dalam pembangunan dan prioritas pemerintah dalam RPJMN di antaranya untuk pembangunan pertanian namun berdasarkan survei awal anggaran dana *gampong* di bidang sektor pertanian hanya sebahagian kecil yang tersalurkan sehingga sulit bagi petani melakukan kegiatan pembangunan pertanian. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat peran dana *gampong* dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari *gampong* penelitian, yaitu dari pengelola dana *gampong* dan masyarakat petani yang ada di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Data sekunder diperoleh dari buku, *website* resmi,

jurnal yang dipublikasikan di internet secara *online* dan melalui instansi dinas terkait yaitu DPMPPKB (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana), Kantor Kecamatan Muara Batu dan BPP (Badan Penyuluhan Pertanian).

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan ringkasan berbagai kondisi berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

- a) Pengumpulan data (*Data Collection*)
- b) Reduksi data (*Data Reduction*)
- c) *Display data*
- d) Verifikasi dan penegasan kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Dana *Gampong* dalam Pembangunan Pertanian

Dana *gampong* diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas dana *gampong* yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan pertanian. Kontribusi

dana *gampong* dalam pembangunan pertanian ini diperoleh dari anggaran dana *gampong* untuk pertanian dibagi dengan anggaran dana *gampong* yang diberikan oleh APBN. Besaran kontribusi dana *gampong* yang digunakan dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Muara Batu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Kontribusi Dana *Gampong* dalam Pembangunan Pertanian di Kecamatan Muara Batu

95

No	Nama <i>Gampong</i>	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Cot Trueng	224.754.550	141.033.150	317.778.090
2	Meunasah Baro	518.864.277	66.518.455	267.291.262
3	Teupin Banja	13.302.000	128.997.006	284.476.700
	Jumlah	756.920.827	336.548.611	869.546.052
	Dana <i>Gampong</i>	1.769.043.000	2.253.712.000	1.973.959.000
	Rata-rata	252.306.942	112.182.870	289.848.684
	Persentase	42%	15%	44%

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021

Peningkatan kontribusi dana *gampong* dalam pembangunan pertanian pada tahun 2018 menunjukkan dana *gampong* untuk pertanian terealisasi dengan baik tetapi peningkatan terjadi bukan karena terealisasinya dengan baik dana *gampong*. Peningkatan kontribusi anggaran tersebut namun tidak akan diterima setiap *gampong*. Besaran peningkatan kontribusi anggaran di atas menunjukkan jika pengelola dana *gampong* merealisasikannya dengan tepat sasaran maka semakin mudah untuk melakukan pembangunan pertanian di Kecamatan Muara Batu

2. Identifikasi Peran Dana *Gampong* dalam Pembangunan Pertanian

Besar dan kecilnya anggaran dana *gampong* berpengaruh terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh pengelola dana *gampong* dalam pembangunan pertanian. Anggaran yang diterima *gampong* sudah ditetapkan penggunaannya oleh APBN namun, *gampong* juga berhak membuat kegiatan baru berdasarkan potensi *gampong* untuk pembangunan *gampong*. Kegiatan - kegiatan

pembangunan *gampong* melalui dana *gampong* dalam pembangunan pertanian yaitu sebagai berikut:

- a. Pengadaan Bibit
- b. Pengadaan Pupuk
- c. Pengadaan Modal Pertanian
- d. Pelatihan Tanaman Hortikultura
- e. Pembuatan Saluran Irigasi
- f. Pembangunan Saluran Tersier
- g. Pembangunan Jalan Usaha Tani
- h. . Pembangunan Balai Pertanian

3. Peran Dana *Gampong* dalam Pembangunan Pertanian

Gampong yang menerima jumlah pagu terbesar tidak menentukan dana *gampong* berperan besar atau baik dalam pembangunan pertanian. *Gampong* yang menerima pagu terkecil mampu berperan baik dalam pembangunan pertanian. Tabel di bawah ini menjelaskan persentase atau besar kecilnya peran dana *gampong* dalam pembangunan pertanian tahun 2018 sampai tahun 2020 di Kecamatan Muara Batu. Uraian peranan dana *gampong* dalam pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Peran Dana *Gampong* dalam Pembangunan Pertanian di *Gampong* Cot Trueng.

No	Tahun	DG (APBN)	DG untuk Pertanian	Anggaran %	Realisasi %
1	2018	604.162.000	224.754.550	37,20%	37,20%
2	2019	768.713.000	141.033.150	18,34%	18,28%
3	2020	643.316.000	206.547.090	32,10%	32,10%

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021.

Hasil wawancara penulis dengan pengelola dana *gampong* dan masyarakat petani bahwa peran dana *gampong* berperan baik. Dana *gampong* membuat prasarana pertanian tidak lagi menjadi permasalahan utama dalam pembangunan pertanian di *gampong* ini. Masyarakat petani mengatakan setelah baiknya prasarana pertanian, mereka merasa lebih bersemangat dalam

melakukan pembangunan pertanian dan produksi padi petani mengalami peningkatan. Produksi padi meningkat dari awalnya sebelum prasarana dibangun rata-rata sebesar 7,2 ton/ha dan menjadi 8,5 ton/ha setelah dilakukannya pembangunan

Tabel 4. Peran Dana *Gampong* dalam Pembangunan Pertanian di *Gampong* Meunasah Baro.

No	Tahun	DG (APBN)	DG untuk Pertanian	Anggaran%	Realisasi %
1	2018	587.090.000	518.864.277	88,37%	86,04%
2	2019	748.162.000	66.518.455	8.89%	8.89%
3	2020	676.840.000	267.291.262	39,49%	39,49%

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021.

Masyarakat petani mengatakan dengan adanya dana *gampong* untuk pembangunan pertanian meningkatkan produksi padi di *gampong*. Namun peningkatan tersebut tidak drastis meningkat seperti *gampong* lainnya karena *gampong* ini sebelumnya sudah memiliki irigasi dan saluran tersier dengan baik, hanya saja tidak rabat beton. Besarnya angka peran dana *gampong* pada tabel di atas tidak menghasilkan peranan yang besar pula di *gampong* meunasah Baro. hasil wawancara mengatakan bahwa pengelola

dana *gampong* kurang pemahan dalam merealisasikan dana *gampong*. Persentase peran dana *gampong* dalam pembangunan pertanian pada *Gampong* Meunasah Baro mengalami penurunan akibat tidak tepatnya pengelolaan dana *gampong* serta sumber daya manusia yang kurang kompeten. Selanjutnya *Gampong* Teupin Banja merupakan *gampong* yang mendapatkan pagu terkecil dari keseluruhan Kecamatan Muara Batu, Persentase peran dana *gampong* dalam pembangunan pertanian *Gampong* Teupin Banja dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. Peran Dana *Gampong* dalam Pembangunan Pertanian *Gampong* di Teupin Banja.

No	Tahun	DG (APBN)	DG untuk Pertanian	Anggaran%	Realisasi%
1	2018	577.791.000	13.302.000	2,30%	0,60%
2	2019	736.837.000	128.997.006	17,50%	11,70%
3	2020	653.803.000	284.476.700	43,51%	43,51%

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021

4. Prinsip Penggunaan Dana *Gampong*

Prinsip penggunaan dana *gampong* dapat berpengaruh terhadap keberhasilan geuchik mengelola dana *gampong* yang diterima khususnya untuk pembangunan pertanian. Adapun prinsip penggunaan dana *gampong* dalam penelitian ini yaitu:

- a. Keadilan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa poin keadilan belum terlaksana dengan baik. Pada *Gampong* Meunasah Baro dan Teupin Banja belum menyertakan modal untuk kegiatan pertanian dikarenakan masih kurangnya pemahaman dalam penggunaan dana *gampong* berdasarkan potensi *gampong*.
- b. Kebutuhan prioritas, berdasarkan hasil penelitian bahwa kebutuhan prioritas belum menjadi poin terpenting bagi masing-masing geuchik karena hasil wawancara peneliti banyak masyarakat tani usul dengan kegiatan bantuan atau pembangunan pertanian agar menjadi kegiatan prioritas dan karena pertanian menjadi sumber mata pencarian utama mereka contohnya masing-masing *gampong* kebutuhan prioritasnya yaitu pupuk dan obat-obatan pertanian.
- c. Kewenangan *Gampong*, berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan *gampong* belum berhasil menjadi salah satu bagian dari penyusunan program pengelolaan dana *gampong*. Hasil wawancara mengatakan bahwa masing-masing *gampong* pernah melakukan perkumpulan masyarakat sebelum penyusunan program kegiatan melalui dana *gampong*. Namun program yang telah diusulkan seluruh masyarakat tani tidak pernah terealisasi.
- d. Partisipatif, berdasarkan hasil penelitian seluruh masyarakat tani daerah penelitian belum mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat. Seluruh masyarakat tani hanya diam mengikuti instruksi kegiatan tanpa adanya antusias terhadap seluruh program yang telah ditetapkan.
- e. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya *Gampong*, swakelola dan berbasis sumber daya *gampong* sangat berpengaruh terhadap keberhasilan geuchik dalam melakukan pembangunan pertanian *gampong* dengan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam *gampong*, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga *gampong* dan kearifan lokal. Namun ketiga *gampong* penelitian belum memiliki suatu kegiatan yang berbasis potensi *gampong* sehingga tidak adanya swakelola seperti yang diharapkan oleh pemerintah.
- f. Tipologi *Gampong*, berdasarkan hasil penelitian, kegiatan yang membangun pertumbuhan perekonomian masyarakat tani belum ada. Kegiatan berhasil dilaksanakan jika ke lima hal di atas terlaksana dengan baik. Tipologi *gampong* harus terlaksana berdasarkan perkembangan *gampong* dengan data indeks *gampong* membangun (IDM). Melalui musyawarah *gampong* akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas *gampong* baik yang berskala *gampong* maupun berskala kabupaten. Tetapi ketiga *gampong* penelitian belum ada melakukan apa pun.

KESIMPULAN

Penggunaan dana *gampong* di *Gampong Cot Trueng*, Meunasah Baro dan Teupin Banja berkontribusi untuk pembangunan pertanian pada tahun 2018 sebesar 42%, pada tahun 2020 sebesar 15% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 44%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan dan realisasi dana *gampong* yang sudah dianggarkan.

Peran dana *gampong* dalam pembangunan pertanian lebih mendominasi kegiatan pembangunan fisik atau prasarana pertanian berupa pembangunan jalan usaha tani, irigasi, saluran tersier dan balai pertanian yang meningkatkan produksi padi dari 7,2 ton/ha menjadi 8,5 ton/ha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah, A. (2018). *Kontribusi Lkm-A Puap Gapoktan Subur Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani*. Iain Purwokerto.
- Abunawas, A. S. A. 2018. *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lex Administratum, 6(1).
- Apriyanto, A. 2005. *Neoliberalisme Sebagai Tantangan Kebijakan Pembangunan Pertanian Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Petani*. Malang, Malang: mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian Nasional Pada Kabinet Indonesia Bersatu.
- Astuti, I. 2015. *Pengelolaan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Ngombakan kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Dinas Pemberdayaan Gampong. 2016. *Dokumen APBGampong Kecamatan Muara Batu*. Aceh Utara
- Fitri, Nurul., Anwar Deli, Fajri. 2018. *Analisis Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tije Kabupaten Pidie*. Unsyiah : Ilmiah Mahasiswa Pertanian. Vol (3): 1 .
- Indonesia, R. 2010. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. *Grand Design Desentralisasi Fiskal*, [pdf] (<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/info-utama/203-grand-designdesentralisasi-fiskal>).
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Lahagu, O. 2018. "Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus

Desa Sitolubanua Kecamatan
Lahewa Kabupaten Nias Utara)" .

Mutolib, Abdul, dkk. 2019. Kontribusi
Dana Desa dalam Pengembangan
Badan Usaha Milik Desa di Desa
Hanura, Kabupaten Pesawaran,
Provinsi Lampung. Lampung:
JSHP.10

Pertanian, D. (2005).
*Rencana Pembangunan
Pertanian Tahun 2005- 2009.*
Departemen Pertanian.

Rakumar, M. 2017. *Penyelesaian
Perkara Khalwat Secara Adat Di
Kota Banda Aceh (Studi Analisis
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun
2008 Tentang Pembinaan
Kehidupan Adat dan Adat
Istiadat dan Qanun Aceh
Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat)* (Doctoral dissertation,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Sekretariat daerah Kota.2019.
*Salinan Qanun Kota Banda
Aceh.* Banda Aceh:1(12)

Tengkumahat, Feiby Vencentia,
dkk. 2017. Dampak Program Dana
Desa terhadap Peningkatan
Pembangunan dan Ekonomi di
Kecamatan Kabupaten
Minahasa.Sulawesi Utara: Agri
Sosio. 13.(2A) :1.

Tundunaung, Liong,dkk. 2018.
*Transparansi Pengelolaan
Dana Desa Di Desa Tabang
Kecamatan Rainis Kabupaten
Kepulauan Talaud.*
Tundunanung: Eksekutif. 1(1)
:1.

Watimena, Dino Lourens,dkk. 2018.
*Analisis Penggunaan Dana Desa
dalam Pembangunan Pertanian di
Perdesaan Kota Ambon.* Ambon:
Agrilan.6.(1).